



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IR. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA**
2. Jabatan : **MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**
3. NHK : **35227**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 109.543.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.686.840.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.058 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.206.250.000
3. Tanah Seluas 3.400 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.139.000.000
4. Bangunan Seluas 200 m2 di NEGARA AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp. 31.222.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 896 m2/575 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 33.191.780.000
6. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 5.097.330.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/672 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 2.550.000.000**

1. MOBIL, BMW 740 LI G12 CKD AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000



3. MOBIL, TOYOTA JEEP LC 200 HDTF Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 1.050.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.173.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	73.983.987.758
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	212.192.796.764
F. HARTA LAINNYA	Rp.	16.637.735.150
Sub Total	Rp.	418.081.319.672
III. HUTANG	Rp.	77.694.908.430
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	340.386.411.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.